



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEI INDARTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 405531

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.640.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/40 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 305.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **269.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI VITARA Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA GL200R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2020, LAINNYA Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **20.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	150.000.000
Sub Total	Rp.	2.085.500.000
III. HUTANG	Rp.	371.874.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.713.626.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.